



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

UPDATE KEADILAN
JULI 2008

**KEADILAN TIDAK DIBERIKAN OLEH KOMISI KEBENARAN
DAN PERSAHABATAN**

Minggu lalu Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) mengeluarkan laporan akhir yang sudah lama ditunggu. Komisi ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste. Komisi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kekerasan yang terjadi ketika Timor Leste memilih kemerdekaan. JSMP telah melakukan serangkaian wawancara tentang KKP dengan para korban dan tokoh masyarakat dari beberapa distrik, yang mendasari analisa terhadap laporan tersebut.

Laporan tersebut meninjau bukti tentang konflik yang telah diteliti oleh investigasi-investigasi sebelumnya, maka laporan ini menarik kesimpulan yang serupa. Yang terpenting, laporan ini menyatakan bahwa pada tahun 1999 militer Indonesia mengarahkan kampanye yang dilaksanakan oleh milisi-milisi asal Timor Leste yang bertanggungjawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia. Hal ini harus dipuji karena merubah sikap resmi dari Indonesia bahwa kekerasan tersebut hanya diakibatkan oleh konflik internal.

Laporan tersebut juga mengakui batasannya sendiri. Dengan mengulangi pernyataan yang sebelumnya dikeluarkan oleh JSMP dan para pengamat lainnya, proses mendengar kesaksian diakui kurang baik. Rupanya bahwa hasil temuan dalam laporan tersebut mencerminkan frustrasi yang dirasakan oleh sebagian anggota Komisi bahwa sebagian saksi menghindari pertanyaan atau hanya ingin membenarkan posisi sendiri, serta ketidakmampuan untuk melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif.

KKP diberi kewenangan untuk merekomendasi amnesti untuk pelaku yang dipanggil menghadiri proses KPP dan menunjukkan sikap menyesal dan bekerjasama sepenuhnya. Orang-orang tersebut hanya memberi kesaksian yang tidak lengkap atau ingin membantu diri sendiri, sehingga kriteria untuk amnesti tidak terpenuhi bagi satu orang pun, dan oleh karena itu rekomendasi untuk amnesti tidak dapat diberikan.

Mandat Komisi tidak termasuk reparasi, sebagaimana termasuk dalam mandat CAVR yang mengerjakan tugasnya secara lebih tegas. Walaupun berguna untuk bersama-sama menyetujui sejarah kejadian-kejadian, banyak orang memandang bahwa proses ini semakin mengesampingkan suara dan kepentingan korban. Walaupun laporan ini memberi rekomendasi yang pantas dipuji, yaitu agar kepala negara meminta maaf di depan umum – sebuah langkah simbolis yang penting untuk memberi pemulihan – rupanya rekomendasi ini tidak disambut hangat oleh pihak resmi.

Pastor Ernesto Barreto dari paroki Suai masih mengalami banyak dampak buruk dari kekerasan 1999, dan dia memberitahu JSMP bahwa “CAVR mempunyai integritas untuk memperhatikan korban dan keluarganya. Namun, KKP bertujuan untuk melindungi para pemimpin yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam krisis humaniter sebagai akibat pendudukan yang dilakukan oleh Indonesia. Mereka seharusnya merasa malu atas upaya ini untuk melindungi diri sendiri – para korban akan terus menderita trauma untuk selamanya dan KKP tidak memberi manfaat sama sekali kepada mereka.”

Orang-orang lain menyatakan bahwa tidak ada pendidikan yang memadai pada tingkat basis tentang proses KKP yang menimbulkan banyak kebingungan dan kemungkinan besar penilaian terhadap dampak dari kekerasan pra-kemerdekaan tidak akan lengkap. Martinho Amaral, yang mengalami luka selama serangan yang dilakukan di Covalima pada tahun 1999, mengatakan bahwa “Kami adalah rakyat biasa yang kurang mengerti proses ini; kami kira bahwa KKP adalah lanjutan dari CAVR karena banyak anggota adalah orang yang sama.”

Laporan tersebut merekomendasi investigasi terhadap orang-orang yang hilang selama periode ini dan dokumentasi tentang konflik – dan rekomendasi tersebut pantas dipuji. Namun, daripada menegaskan penciptaan proses dan badan hukum yang baru, para pengamat merasa bahwa lebih baik untuk merekomendasi tindakan yang lebih praktis yang berbentuk kompensasi.

Juru bicara para korban, Anita Tilman dos Santos, memberitahu JSMP bahwa “Bagi keluarga korban 1999 seperti kami, keberadaan KKP membuat kami merasa sedih jika seandainya mereka yang mati tidak dihargai sama sekali oleh pemerintah. Proses ini hanya melayani pemimpin negara kita – rakyat biasa seperti kami hanya bisa duduk dan lihat tanah dan bertanya: kapan bisa dapat keadilan kalau pemerintah tidak mempunyai niat baik?”

Antara orang-orang yang diwawancarai, ada banyak orang yang merasa bahwa keperluan untuk ikatan diplomatik yang kuat antara Indonesia dan Timor Leste seharusnya tidak melebihi himbauan untuk mengadili para pelaku. Koordinator

Distrik Liquica, Alberto Gomes, memberitahu JSMP bahwa “hubungan antara Indonesia dan Timor Leste dapat dibina seperti biasa, tetapi tidak berarti kita harus mengorbankan proses pencarian kebenaran dan keadilan melalui pengadilan.”

Sesuai dengan acuan baca Komisi, laporan tidak menyebutkan orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kekerasan; dan juga tidak mendorong penuntutan. Sejumlah orang yang diwawancarai oleh JSMP berbicara tentang kepercayaan mereka bahwa masih banyak pertanyaan belum terjawab oleh karena kepentingan politik.

Warga Maubara dan korban dari kekerasan 1999, Filomena de Jesus Santa, mengatakan bahwa “menurut pendapat saya, keadilan harus ditegakkan oleh pengadilan yang terbuka untuk umum. Tidak ada alasan untuk mempunyai hubungan baik dengan sebuah negara yang telah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia kalau mereka tidak mau mengungkapkan kebenaran di hadapan pengadilan. Mengapa negara kita harus takut pada mereka?”

KKP dimaksudkan untuk mengakhiri perdebatan nasional tentang penyebab dan akibat mengapa jalan menuju kemerdekaan penuh dengan kesulitan bagi Timor Leste, namun jelas bahwa proses ini tidak meniadakan amarah publik. Para politisi dari kedua belah pihak tidak mendukung kemungkinan untuk membentuk pengadilan untuk melakukan investigasi selanjutnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang tentu saja dilakukan pada rakyat Timor Leste. Walaupun pemerintah tidak mau, ada dukungan kuat dari masyarakat untuk proses peradilan.

Domingas Mouzinho, seorang korban selamat dari pembunuhan di gereja Suai yang terjadi pada tahun 1999, meminta “keadilan melalui pengadilan – saya tidak peduli kalau pengadilan internasional atau nasional, yang penting adalah mengadili para pelaku kejahatan supaya korban seperti kami dapat merasa puas.”

Sekarang para pihak yang membentuk proses KKP, yaitu Indonesia dan Timor Leste, harus menjamin bahwa laporan ini bukan saja retorik. Walaupun laporan tersebut memuat beberapa kebenaran yang sulit diterima, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk sepenuhnya menghadapi peninggalan dari kekerasan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh banyak orang. Walaupun para pemimpin politik barangkali ingin melupakan masa lalu, bagi banyak orang hal ini tidak mungkin kalau keadilan belum diberikan kepada para korban, dan pelaku belum diadili.

Rita Pereira dos Santos, yang kehilangan beberapa anggota keluarga dalam serangan yang dilakukan oleh milisi di Liquica, meringkas pendapatnya tentang Komisi dan mengatakan bahwa “Kami, anggota keluarga, akan sangat sedih kalau tuntutan kami tidak diwujudkan dan kalau pemerintah kita sendiri tidak mendengar kami. Sepertinya kami dibunuh kembali, bukan secara langsung seperti korban 1999, tetapi penderitaan seperti ini lebih buruk karena berkelanjutan dan kami akan berpikir tentang hal ini untuk selamanya”.

Untuk informasi selanjutnya, atau wawancara, harap hubungi:

Timotio de Deus

Direktur, JSMP

| Email: timotio@jsmp.minihub.org

Mobile: +670 729 2909

Kantor: +670 3323883